

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2018

<http://sulsulsel.bps.go.id>

UMUR
HARAPAN
HIDUP



HARAPAN
LAMA
SEKOLAH



PENGELUARAN
PERKAPITA
DISESUAIKAN



RATA-RATA
LAMA
SEKOLAH



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2018

<https://bps.ssel.bps.go.id>



UMUR
HARAPAN
HIDUP



HARAPAN
LAMA
SEKOLAH



PENGELUARAN
PERKAPITA
DISESUAIKAN



RATA-RATA
LAMA
SEKOLAH



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

ISBN : 978-623-7581-01-7
Katalog BPS : 4102002.73
Nomor Publikasi : 73550.1921
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 56 halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

*Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan,
dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk
Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik*

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2018**

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab

Didik Nursetyohadi

Editor

Joko Siswanto

Penulis

Wuri Wahyuni

Desain Cover dan Layout

Muhammad Ilham Mubarak

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2018 ini memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota, disparitas pembangunan dari berbagai aspek dan isu terkait daya beli masyarakat.

Ada tiga pilihan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber – sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Pada tahun 2018 capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,90 dan telah berada pada status tinggi sejak tahun 2017.

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik di masa mendatang. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Makassar, Oktober 2019



Yos Rusdiansyah

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
viii	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR LAMPIRAN
1	BAB I
	PENDAHULUAN
3	1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia
6	1.2. Indikator IPM Metode Baru
9	1.3. Penghitungan IPM Metode Baru
9	1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia
10	1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia
11	BAB II
	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
13	2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
15	2.2. Status IPM Sulawesi Selatan
17	2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
27	BAB III
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
	CAPAIAN DAN TANTANGAN
29	3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan
30	3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan
31	3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi
33	BAB IV
	DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
35	4.1. Disparitas Antarindividu
35	4.2. Disparitas Antargender
37	4.3. Disparitas Antarwilayah
41	BAB V
	DAYA BELI MASYARAKAT
43	5.1. Isu Pelemahan Daya Beli
44	5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli
47	LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 8 : Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maximum IPM Metode Baru
- 14 : Tabel 2.1 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provisni di Pulau Sulawesi, 2018
- 15 : Tabel 2.2 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2017-2018
- 19 : Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017 - 2018
- 20 : Tabel 2.4 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017 - 2018
- 21 : Tabel 2.5 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017 - 2018 (Tahun)
- 22 : Tabel 2.6 Harapan Lama Sekolah Menurut (HLS) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017 - 2018 (Tahun)
- 23 : Tabel 2.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017 - 2018 (Tahun)
- 28 : Tabel 2.8 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2016 - 2017 (Ribu Rupiah)
- 43 : Tabel 5.1 Distribusi persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2013 - 2018 (persen)

Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru
- 8 : Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 9 : Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru
- 9 : Gambar 1.6 Klasifikasi Capaian IPM
- 13 : Gambar 2.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional
- 13 : Gambar 2.2 IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2018
- 16 : Gambar 2.3 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2011-2018
- 16 : Gambar 2.4 Tren Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2011-2018
- 17 : Gambar 2.5 Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2011-2018
- 18 : Gambar 2.6 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2011-2018
- 19 : Gambar 2.7 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan terendah, 2017-2018
- 20 : Gambar 2.8 Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2018
- 29 : Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2018 (persen)
- 30 : Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013 – 2018 (persen)
- 32 : Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2013 – 2018
- 32 : Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus 2013 – Agustus 2018 (persen)
- 35 : Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan September 2013 – September 2018
- 36 : Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018
- 37 : Gambar 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018
- 38 : Gambar 4.4 Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2010-2018
- 38 : Gambar 4.5 Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2010 – 2018

Daftar Gambar

- 39 : **Gambar 4.6** Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jenepono, 2010 – 2018
- 39 : **Gambar 4.7** Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2010 – 2018
- 44 : **Gambar 5.1** Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan (y on y), 2017-2018
- 44 : **Gambar 5.2** Laju Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan, 2013-2018
- 45 : **Gambar 5.3** Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan, 2018

Daftar Lampiran

- 49 : Lampiran 1 Tren Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)
- 50 : Lampiran 2 Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)
- 51 : Lampiran 3 Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)
- 52 : Lampiran 4 Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Ribu Rupiah)
- 53 : Lampiran 5 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018
- 54 : Lampiran 6 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2011-2018
- 55 : Lampiran 7 Tren Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2017-2018

BAB I

Pendahuluan

<https://sulsel.bps.go.id>



Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberadaan manusia sebagai pelaku pembangunan tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

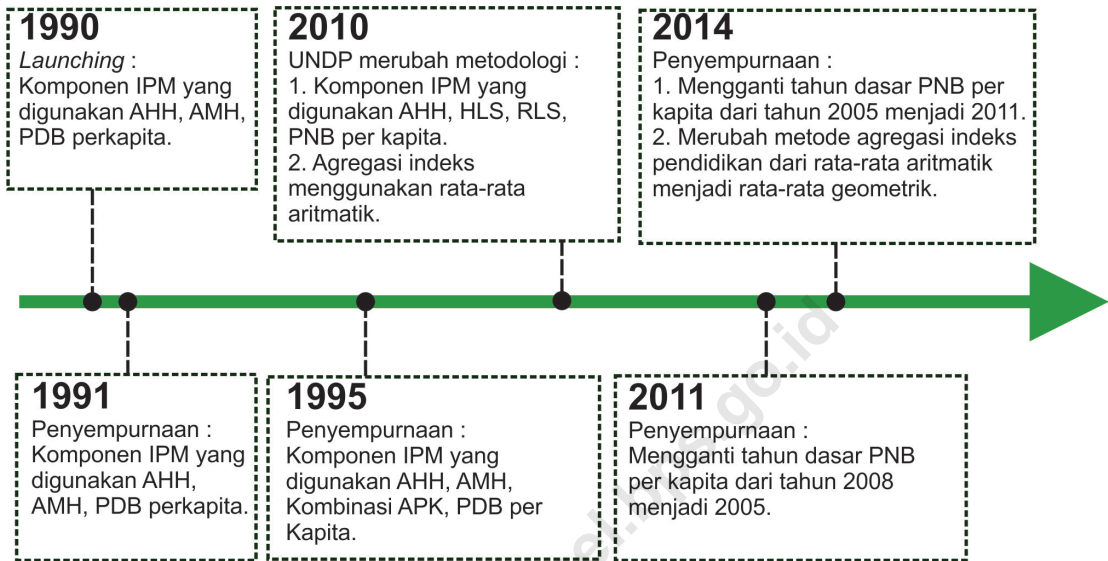
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Oleh karena itulah konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki konsep pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat meliputi: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (BPS, 2017).

1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,

dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, laporan pembangunan manusia telah dikembangkan, dan yang terakhir penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Adapun metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik

1990	2010
DIMENSI/INDIKATOR	DIMENSI/INDIKATOR
A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
B. Pendidikan	B. Pendidikan
C. Angka Melek Huruf (AMH)	C. Harapan Lama Sekolah (HLS)
D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
E. Standar Hidup: PDB perkapita	E. Standar Hidup: PNB perkapita
AGREGASI INDEKS	AGREGASI INDEKS
Rata-rata Hitung	Rata-rata ukur/Geometrik

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM

Adapun indikator yang berubah, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Perubahan metode penghitungan IPM menghasilkan nilai IPM yang lebih sempurna dibanding IPM metode sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah karena menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru

dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB yang menggantikan PDB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Penambahan komoditas yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan menghasilkan nilai yang lebih baik.

Keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.2. Indikator IPM Metode Baru

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dasar penghitungan AHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK = Faktor Koreksi Pesantren

E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t

i = Penduduk usia (a, a+1, ..., n)

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan

komoditas nonmakanan.

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana *share* 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan *share* sebesar 73,63 persen.



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM

Untuk menghitung nilai dari masing-masing indeks pembentuk IPM, UNDP telah menetapkan batas minimum dan batas maksimum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990, batas diperoleh dari hasil observasi, sedangkan pada tahun 1994 menggunakan suatu nilai batas tertentu. Mulai tahun 2010, penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Batas minimum pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten pada tahun 2010. Angka tersebut merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maximum IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

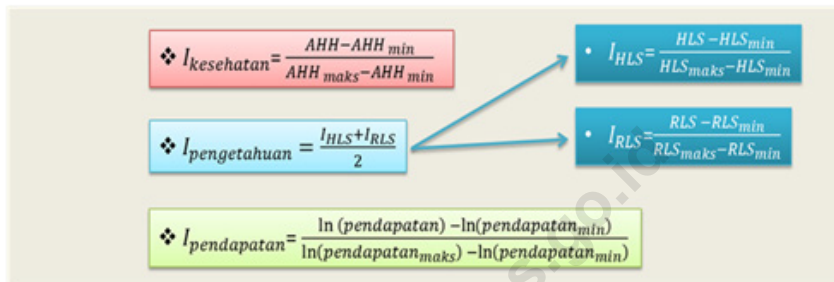
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

1.3. Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Secara ringkas, proses penghitungan indeks untuk IPM metode baru dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru

1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk membandingkan antar wilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Gambar 1.6 Klasifikasi Capaian IPM

1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, dan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun ke t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun ke t-1

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB II

Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

<https://sulsel.scribd.com>

BAB II

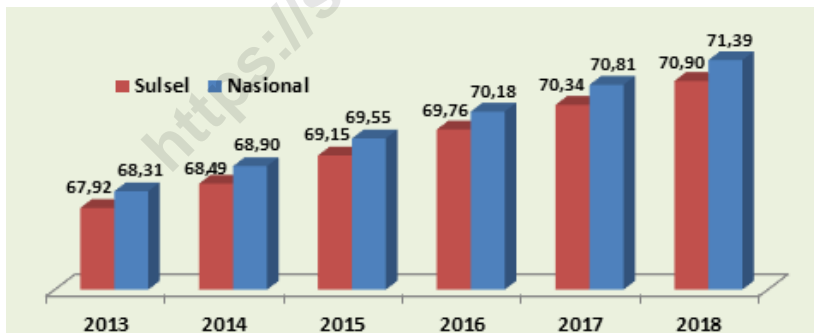
Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan terus bertumbuh. Berdasarkan hasil perhitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 telah mencapai 70,90 dan secara nasional berada pada peringkat 14, memiliki peringkat yang sama sejak tahun 2015.

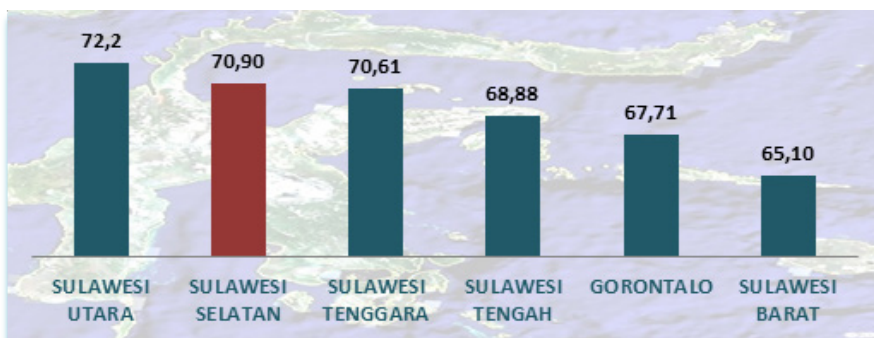
IPM Sulsel di tahun 2018 berstatus tinggi yang telah mengalami proses perubahan status dari sedang menjadi tinggi di tahun 2017. Selama periode 2013 hingga 2018 angka IPM Sulawesi Selatan masih di bawah IPM nasional.

Untuk jajaran provinsi di pulau Sulawesi, IPM Sulawesi Selatan berada pada posisi ke dua setelah Sulawesi Utara. Sejak periode 2010 hingga 2018 capaian IPM tertinggi di pulau Sulawesi masih diduduki oleh Sulawesi Utara. Pada tahun 2018 IPM Sulawesi Utara mencapai 72,20. Sementara Sulawesi Barat dengan nilai IPM 65,10, menjadi provinsi dengan IPM terendah di pulau Sulawesi.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.2 IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2018

Pada tahun 2018, IPM Sulawesi Tenggara berubah status dari sedang menjadi tinggi, artinya sudah ada 3 provinsi yang mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat masih tetap masuk kategori “sedang”.

Tabel 2.1 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2018

Provinsi	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Sulawesi Utara	71,26	12,68	9,24	10.731	72,20
Sulawesi Tengah	67,78	13,13	8,52	9.488	68,88
Sulawesi Selatan	70,08	13,34	8,02	10.814	70,90
Sulawesi Tenggara	70,72	13,53	8,69	9.262	70,61
Gorontalo	67,45	13,03	7,46	9.839	67,71
Sulawesi Barat	64,58	12,59	7,50	9.051	65,10
Indonesia	71,20	12,91	8,17	11.059	71,39

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Selisih capaian IPM Sulawesi Utara dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 1,3 poin. Perbedaan ini disebabkan perbedaan capaian komponen IPM Sulawesi Selatan dengan provinsi tersebut. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, secara komponen, Sulawesi Selatan unggul pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara Sulawesi Utara unggul pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan lebih rendah 1,18 tahun dibandingkan Sulawesi Utara. Jika di Sulawesi Selatan, bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 70,08 tahun, di Sulawesi Utara bayi baru lahir memiliki harapan hidup lebih panjang, yaitu 71,26 tahun. Untuk bidang Pendidikan, Sulawesi Selatan memiliki level yang berbeda dengan Sulawesi Utara. Penduduk usia 7 tahun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan SMA (12,68 tahun untuk Sulawesi Utara dan 13,34 untuk Sulawesi Selatan). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yaitu 1,22 tahun. Sulawesi Utara memiliki rata-rata lama sekolah selama 9,24 tahun sementara di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,02 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Sulawesi Selatan lebih tinggi dibanding Sulawesi Utara.

2.2. Status IPM Sulawesi Selatan

Capaian IPM tak lepas dari komponen pembentuknya, IPM merupakan indeks komposit agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Tabel 2.2 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2017-2018

Komponen	2017	2018
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,84	70,08
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,95	8,02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,28	13,34
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun (PPP))	10,49	10,81
Indeks Pembangunan Manusia	70,34	70,9

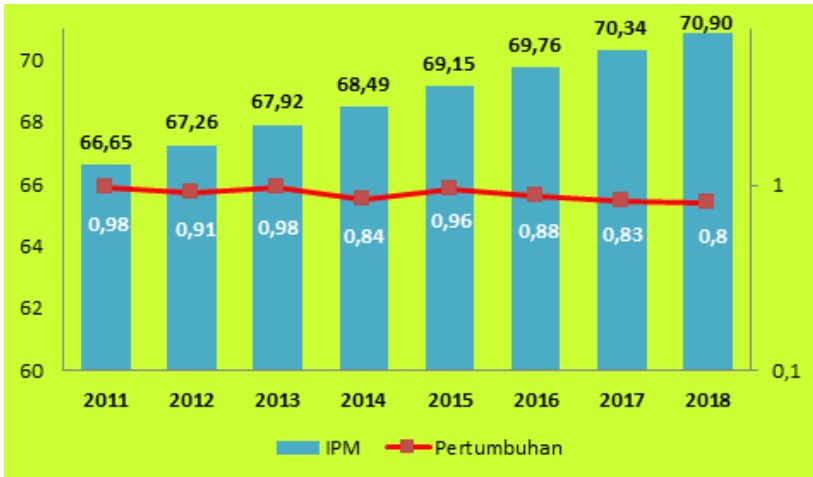
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Saat ini, usia harapan hidup lahir di Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,08 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,02 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 – 3 SMP. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,34 tahun atau setara Diploma I. Standar hidup layak Sulawesi Selatan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan sudah mencapai 10,81 juta per kapita per tahun.

“Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan”

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Sulawesi Selatan. Dilihat dari trennya, IPM Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2011-2018, terjadi kenaikan sebesar 4,25 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan, meski kecil namun tetap tumbuh secara positif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,90 persen pertahun dalam periode 2011-2018, meskipun pertumbuhannya cenderung melambat. Sementara pada periode 2017-2018, pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,80 persen.



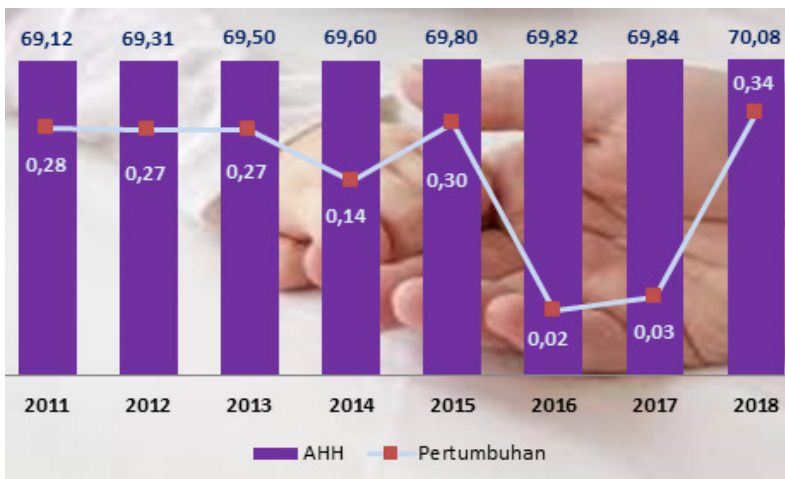
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.3 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2011-2018

Dimensi Kesehatan

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2011 – 2017 cenderung stabil pada kisaran 69 tahun dan mencapai 70,08 tahun di tahun 2018.

Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya AHH di Sulawesi Selatan.



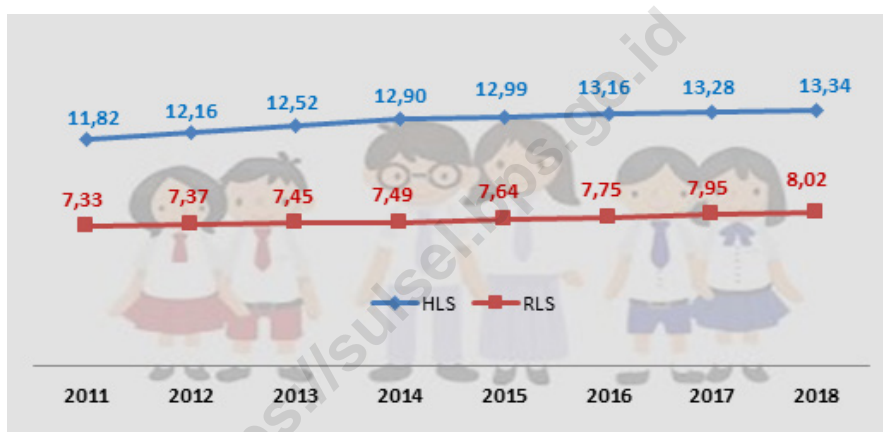
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.4 Tren Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2011-2018

Dimensi Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Hasil kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada periode tahun 2011-2018, tren harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,45 persen. Sedangkan tren rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan yang signifikan pada periode yang sama. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,88 persen.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.5 Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2011-2018

Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2011-2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita disesuaikan naik sebesar 3,10 persen atau sekitar 325 ribu rupiah. Jika pada tahun 2011 pengeluaran per kapita penduduk berkisar sekitar 9,46 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2018 mencapai 10,81 juta rupiah perkapita per tahun.

2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di Sulsel cukup bervariasi, angka IPM berada pada rentang 63,33 hingga 81,73. Di tahun 2018, IPM tertinggi untuk level kabupaten/kota masih diduduki oleh Kota Makassar sebesar 81,73. Kemudian disusul oleh Kota Palopo (77,30) dan Kota Parepare (77,19). Tiga wilayah kota di Sulawesi Selatan ini menunjukkan capaian pembangunan manusia wilayah perkotaan lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.6 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2011-2018

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Sedangkan 3 kabupaten dengan capaian IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto (63,33), Kabupaten Bone (65,04) dan Kabupaten Selayar (66,04). Peringkat Selayar tidak bergeser sejak tahun 2016, sementara peringkat kabupaten Bone dan Jeneponto tidak pernah bergeser sejak 2010.

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2017-2018, Kabupaten Soppeng menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,40 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bone sebesar 1,37 persen dan Kabupaten Tana Toraja sebesar 1,25 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Wajo sebesar 0,57 persen, kemudian Kabupaten Luwu Utara sebesar 0,64 persen dan Kota Parepare sebesar 0,66 persen.

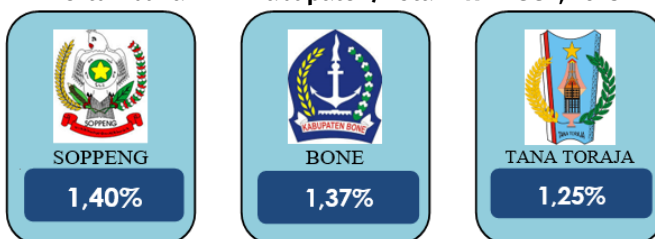
Selama periode tahun 2017-2018 ada 3 kabupaten yang mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi, yaitu Barru, Sidenreng Rappang, dan Pinrang. Sehingga total di tahun 2018, terdapat 7 kabupaten/kota yang berstatus tinggi. Kota Makassar menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang berstatus sangat tinggi. Sementara mayoritas status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih pada kategori sedang, yaitu ada sebanyak 16 kabupaten yang berstatus sedang.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018

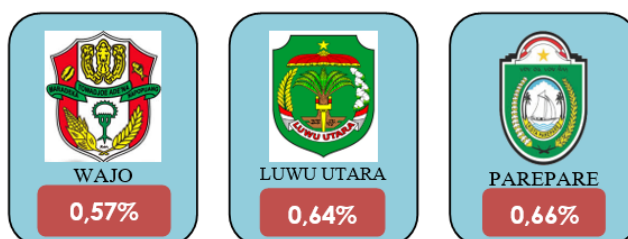
Kabupaten/Kota	IPM		
	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Selayar	65,39	66,04	1,00
Bulukumba	67,08	67,70	0,94
Bantaeng	67,27	67,76	0,73
Jeneponto	62,67	63,33	1,06
Takalar	65,48	66,07	0,90
Gowa	68,33	68,87	0,78
Sinjai	65,80	66,24	0,67
Maros	68,42	68,94	0,75
Pangkajene Kepulauan	67,25	67,71	0,68
Barru	69,56	70,05	0,70
Bone	64,16	65,04	1,37
Soppeng	66,67	67,60	1,40
Wajo	68,18	68,57	0,57
Sidenreng Rappang	69,84	70,60	1,10
Pinrang	69,90	70,62	1,04
Enrekang	71,44	72,15	1,00
Luwu	69,02	69,60	0,84
Tana Toraja	66,82	67,66	1,25
Luwu Utara	68,35	68,79	0,64
Luwu Timur	71,46	72,16	0,98
Toraja Utara	67,90	68,49	0,87
Makasar	81,13	81,73	0,74
Parepare	76,68	77,19	0,66
Palopo	76,71	77,30	0,77
Sulawesi Selatan	70,34	70,90	0,80

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota TERTINGGI , 2018

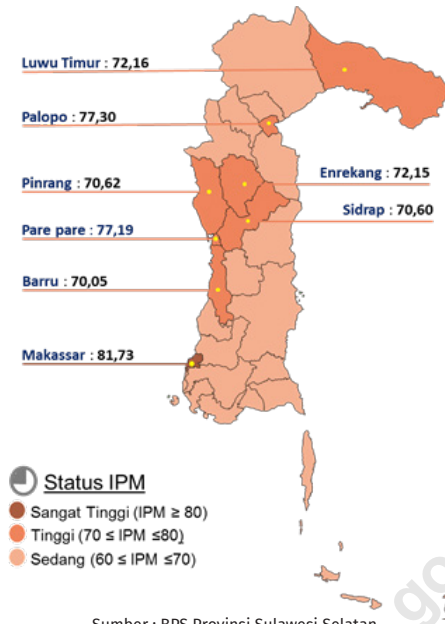


Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota TERENDAH , 2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.7 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan terendah, 2018



Gambar 2.8 Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2018

Tabel 2.4 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Status Pembangunan Manusia	
	2017	2018
Selayar	sedang	sedang
Bulukumba	sedang	sedang
Bantaeng	sedang	sedang
Jeneponto	sedang	sedang
Takalar	sedang	sedang
Gowa	sedang	sedang
Sinjai	sedang	sedang
Maros	sedang	sedang
Pangkajene Kepulauan	sedang	sedang
Barru	sedang	tinggi
Bone	sedang	sedang
Soppeng	sedang	sedang
Wajo	sedang	sedang
Sidenreng Rappang	sedang	tinggi
Pinrang	sedang	tinggi
Enrekang	tinggi	tinggi
Luwu	sedang	sedang
Tana Toraja	sedang	sedang
Luwu Utara	sedang	sedang
Luwu Timur	tinggi	tinggi
Toraja Utara	sedang	sedang
Makasar	sangat tinggi	sangat tinggi
Parepare	tinggi	tinggi
Palopo	tinggi	tinggi
Sulawesi Selatan	tinggi	tinggi

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Angka Harapan Hidup berbanding lurus dengan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kualitas masyarakat, maka angka harapan hidup semakin meningkat. Membaiknya keadaan dan sistem pelayanan kesehatan di Sulsel sangat berperan dalam menunjang kualitas kesehatan. Program kesehatan gratis telah dicanangkan pemerintah Sulsel sejak tahun 2008. Penguatan puskesmas merupakan awal dari kesehatan gratis yang diterapkan, puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang paling diminati masyarakat Sulsel untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (49,69 persen). Angka kunjungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan pun meningkat signifikan setiap tahunnya.

Pertumbuhan AHH Sulawesi Selatan meningkat sebesar 0,34 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 69,84 menjadi 70,08 pada tahun 2018. Terdapat dua kabupaten/kota yang pertumbuhannya sama dengan Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu dan Luwu Timur. Pertumbuhan AHH tertinggi dicapai Kabupaten Sidenreng Rappang (0,48 persen), sementara terendah di

Tabel 2.5 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018 (Tahun)

Kabupaten/Kota	AHH		
	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Selayar	67,82	68,03	0,31
Bulukumba	66,96	67,27	0,46
Bantaeng	69,90	70,11	0,30
Jeneponto	65,65	65,89	0,37
Takalar	66,38	66,64	0,39
Gowa	69,95	70,11	0,23
Sinjai	66,61	66,83	0,33
Maros	68,60	68,74	0,20
Pangkajene Kepulauan	65,86	66,12	0,39
Barru	68,30	68,60	0,44
Bone	66,22	66,50	0,42
Soppeng	68,72	69,02	0,44
Wajo	66,52	66,79	0,41
Sidenreng Rappang	68,82	69,15	0,48
Pinrang	68,68	68,98	0,44
Enrekang	70,38	70,55	0,24
Luwu	69,60	69,84	0,34
Tana Toraja	72,56	72,80	0,33
Luwu Utara	67,61	67,90	0,43
Luwu Timur	69,79	70,03	0,34
Toraja Utara	72,94	73,09	0,21
Makasar	71,51	71,70	0,27
Parepare	70,69	70,88	0,27
Palopo	70,30	70,49	0,27
Sulawesi Selatan	69,84	70,08	0,34

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Sinjai (0,20 persen). Ada 11 kabupaten/kota yang mempunyai angka pertumbuhan AHH lebih tinggi dari pertumbuhan AHH Sulawesi Selatan.

Tidak berbeda dengan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,45 persen dari 13,28 menjadi 13,34 di tahun 2018. Terdapat enam kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih tinggi dibanding pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan. Kota Makassar menjadi wilayah yang mempunyai pertumbuhan HLS tertinggi (2,44 persen). Sementara 23 kabupaten /kota lainnya tumbuh di bawah 2 persen.

Untuk angka HLS, ada 7 kabupaten/kota yang mempunyai capaian HLS lebih tinggi dari HLS Sulsel di tahun 2018. Selebihnya, masih dibawah rata-rata HLS Sulsel. Daerah yang mempunyai nilai paling tinggi untuk HLS nya adalah daerah perkotaan, yaitu Makassar, Palopo dan Parepare. HLS tertinggi dicapai oleh Kota Makassar sebesar 15,55 tahun. Sementara kabupaten/kota yang memiliki HLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan nilai HLS sebesar 11,95 tahun, diikuti Bantaeng (12,01 tahun) dan Takalar (12,22 tahun). Harapan lama sekolah

Tabel 2.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018 (Tahun)

Kabupaten/Kota	HLS		
	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Selayar	12,45	12,46	0,08
Bulukumba	12,65	12,79	1,11
Bantaeng	11,99	12,01	0,17
Jeneponto	11,93	11,95	0,17
Takalar	12,21	12,22	0,08
Gowa	13,04	13,29	1,92
Sinjai	12,84	12,85	0,08
Maros	12,97	12,99	0,15
Pangkajene Kepulauan	12,40	12,41	0,08
Barru	13,55	13,56	0,07
Bone	12,43	12,67	1,93
Soppeng	12,33	12,57	1,95
Wajo	13,09	13,11	0,15
Sidenreng Rappang	12,90	12,91	0,08
Pinrang	13,19	13,20	0,08
Enrekang	13,66	13,68	0,15
Luwu	13,28	13,30	0,15
Tana Toraja	13,25	13,50	1,89
Luwu Utara	12,38	12,39	0,08
Luwu Timur	12,79	12,81	0,16
Toraja Utara	13,34	13,35	0,07
Makasar	15,18	15,55	2,44
Parepare	14,46	14,47	0,07
Palopo	15,05	15,06	0,07
Sulawesi Selatan	13,28	13,34	0,45

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

merupakan pendorong untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, sehingga program pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah yang akan meningkatkan harapan lama sekolah dan pada akhirnya membuat rata-rata lama sekolah juga meningkat.

Dimensi lain dari pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada tahun 2018, RLS Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,88 persen dan mencapai angka 8,02 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25

Tabel 2.7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018 (Tahun)

Kabupaten/Kota	RLS		
	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Selayar	7,18	7,40	3,06
Bulukumba	7,16	7,34	2,51
Bantaeng	6,45	6,47	0,31
Jeneponto	5,98	6,21	3,85
Takalar	6,77	6,91	2,07
Gowa	7,74	7,75	0,13
Sinjai	7,28	7,29	0,14
Maros	7,42	7,43	0,13
Pangkajene Kepulauan	7,48	7,49	0,13
Barru	7,85	7,86	0,13
Bone	6,77	6,97	2,95
Soppeng	7,42	7,63	2,83
Wajo	6,78	6,79	0,15
Sidenreng Rappang	7,52	7,79	3,59
Pinrang	7,54	7,84	3,98
Enrekang	8,43	8,68	2,97
Luwu	7,89	7,97	1,01
Tana Toraja	7,93	7,94	0,13
Luwu Utara	7,52	7,53	0,13
Luwu Timur	8,20	8,45	3,05
Toraja Utara	7,73	7,76	0,39
Makasar	11,08	11,09	0,09
Parepare	10,09	10,29	1,98
Palopo	10,33	10,51	1,74
Sulawesi Selatan	7,95	8,02	0,88

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah sampai SMP kelas VII. Pertumbuhan RLS tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pinrang (3,98 persen) dan terendah dicapai oleh Kota Makassar (0,09 persen).

Capaian RLS tertinggi di tahun 2018 adalah Kota Makassar sebesar 11,09 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di kota Makassar adalah sampai dengan SMA kelas XI. Sementara dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 yaitu Kota Palopo (10,51) dan Kota Parepare (10,29), yang sebanding dengan SMA kelas X.

RLS terendah pada tahun 2018 adalah Kabupaten Jeneponto dimana capaian RLS mencapai 6,21 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto hanya sampai dengan kelas VI SD.

Dimensi pengeluaran ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). PPP Sulawesi Selatan tahun 2018 mencapai Rp.10,81 juta per kapita per tahun.

Tabel 2.8 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2017-2018 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)		
	2017	2018	Pertumbuhan (%)
Selayar	8.436	8.666	2,73
Bulukumba	1.0217	10.331	1,12
Bantaeng	10.751	11.153	3,74
Jeneponto	8.747	8.957	2,40
Takalar	9.845	10.134	2,94
Gowa	9.009	9.179	1,89
Sinjai	8.816	9.098	3,20
Maros	10.121	10.558	4,32
Pangkajene Kepulauan	10.837	11.197	3,32
Barru	10.285	10.622	3,28
Bone	8.470	8.686	2,55
Soppeng	9.035	9.291	2,83
Wajo	11.770	12.057	2,44
Sidenreng Rappang	11.523	11.834	2,70
Pinrang	11.279	11.508	2,03
Enrekang	10.359	10.683	3,13
Luwu	9.381	9.705	3,45
Tana Toraja	6.801	7.087	4,21
Luwu Utara	11.101	11.429	2,95
Luwu Timur	12.030	12.346	2,63
Toraja Utara	7.457	7.783	4,37
Makasar	16.367	16.597	1,41
Parepare	13078	13.303	1,72
Palopo	12319	12.662	2,78
Sulawesi Selatan	10489	10814	3,10

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2018, tampak bahwa 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai nilai PPP tertinggi, masing-masing Makassar (16,60 juta perkapita pertahun), Parepare (13,30 juta), dan Palopo (12,66 juta). Selain 3 kota dengan PPP tertinggi, terdapat 10 kabupaten/kota yang capaian PPP tahun 2018 lebih tinggi dari PPP Sulawesi Selatan. Capaian PPP terendah dicapai oleh Tana Toraja yaitu sebesar 7,09 juta per kapita pertahun.

Perkembangan nilai PPP Sulsel 2018 terhadap 2017, sebesar 3,10 persen. Meski menjadi kabupaten dengan nilai PPP terendah kedua setelah Tana Toraja, namun dalam rentan 2017-2018, pertumbuhan PPP Toraja Utara menjadi yang tertinggi diantara semua kabupaten/kota, dengan pertumbuhan 4,37 persen. Sementara Bulukumba menjadi kabupaten dengan pertumbuhan PPP terendah (1,12 persen).

<https://s Sulsel.bps.go.id>

BAB III

Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

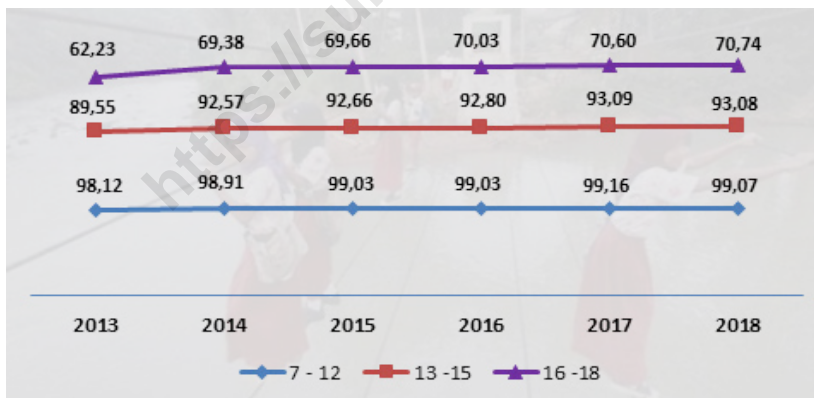
<https://sulsel.scribd.com>

BAB III

Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pendidikan di suatu wilayah, perlu mengupayakan segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari penyelenggaraan, sarana, dan prasarana. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa program telah diupayakan pemerintah seperti pemberian bantuan operasional sekolah yang lebih dikenal dengan istilah dana BOS. Selain pendidikan gratis, pencaangan program wajib belajar melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun juga dilakukan. Harapannya adalah capaian angka putus sekolah, maupun buta aksara dapat terminimalisir, serta meratanya jaminan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2018 (persen)

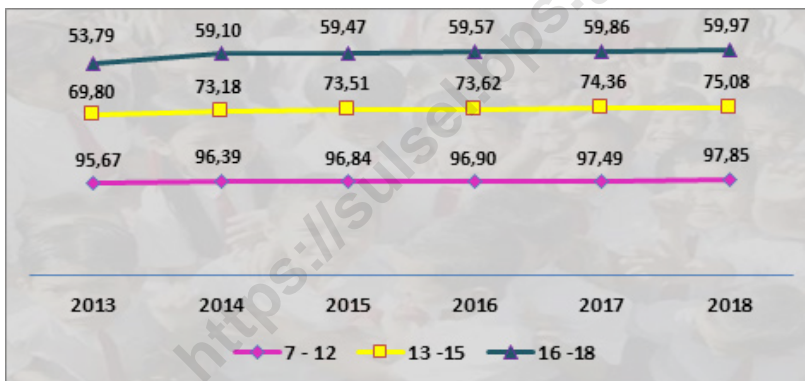
Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

APS usia 7 – 12 tahun (setara SD/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 99,07 persen. Artinya tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan SD di Sulawesi Selatan sudah cukup tinggi meski jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan (2017 = 99,16 persen)

APS usia 13 – 15 tahun (setara SMP/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 mencapai 93,08 persen lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13 – 15 tahun sedikit mengalami penurunan (2017 = 93,09 persen)

APS usia 16 – 18 tahun (setara SMA/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 mencapai 70,74 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7 – 12 tahun dan APS usia 13 – 15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16 – 18 tahun ini juga mengalami kenaikan (2017 = 70,60 persen).

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, dapat juga menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013 – 2018 (persen)

Jika melihat grafik, perkembangan APM Sulsel di seluruh jenjang mengalami peningkatan. APM usia 7 – 12 tahun (SD/ sederajat) di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 telah mencapai 97,85 persen, sedangkan APM usia 13 – 15 tahun (SMP/ sederajat) pada tahun 2018 mencapai 75,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 25 persen anak usia 13 – 15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat. Sedangkan APM usia 16 – 18 tahun masih berada pada kisaran angka 59,97 persen.

3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Pada tahun 2018 capaian AHH Sulawesi Selatan sebesar 70,08 tahun. Meningkat 0,34 persen dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam

melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Berdasarkan hasil olah Susenas tahun 2017 dan 2018 diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian AHH Sulawesi Selatan yaitu usia hamil pada perkawinan pertama dan penolong kelahiran/tempat melahirkan.

Tingkat kesadaran perempuan untuk menikah di usia kurang dari enam belas tahun semakin meningkat yang ditandai dengan presentasi perempuan umur pertama kali menikah di bawah usia enam belas tahun pada tahun 2017 sebesar 17,24 persen, turun sebesar 0,87 poin pada tahun 2018 (16,37 persen). Mayoritas perempuan Sulsel melakukan pernikahan pertama pada usia 21 tahun keatas (44,59 persen).

Selain itu, kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik. Pada tahun 2017 persentase perempuan yang melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 82,24 persen, meningkat sebesar 1,26 poin di tahun 2018 (83,5 persen). Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah dan lainnya pada tahun 2017 sebesar 17,76 persen, turun menjadi 16,50 persen di tahun 2018.

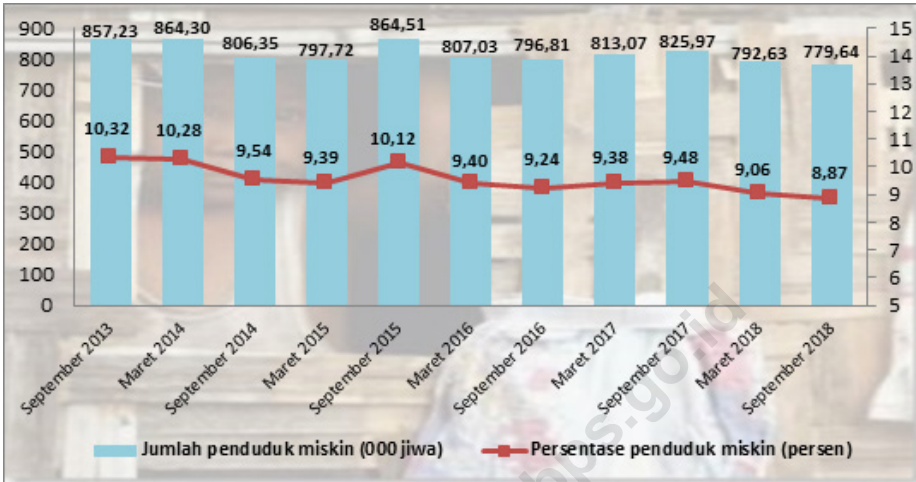
3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

Data kemiskinan diperoleh dari Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), dimana pelaksanaannya dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan September. Berdasarkan hasil olah Susenas Maret 2013 – September 2018 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi baik dari jumlah maupun persentase. Dalam periode yang sama, secara kumulatif dari periode September 2013 hingga September 2018, penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 83,59 ribu jiwa. Jika dilihat secara persentase, kemiskinan mengalami penurunan dari 10,32 persen pada September 2013 menjadi satu digit angka sebesar 8,87 persen pada September 2018.

Tren tingkat kemiskinan pada periode September, selama kurun waktu 2013 hingga 2018 mengalami penurunan kecuali pada tahun 2015, dan 2017. Jika dibandingkan dengan September 2017, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 berhasil turun kembali sebesar 0,61 poin atau penduduk miskin berkurang sebesar 46,33 ribu jiwa.

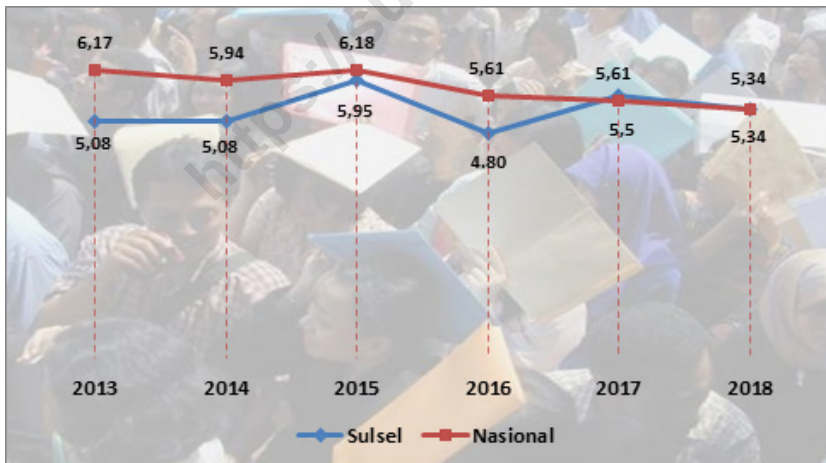
Menurunnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang dibandingkan dengan tahun 2017 diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran

terbuka nasional maka tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan periode 2013 hingga 2018 selalu lebih rendah dibanding nasional, kecuali di tahun 2017, dimana pada saat itu, kemiskinan Sulsel juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2016.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2013 – 2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus Tahun 2013 –2018 (Persen)

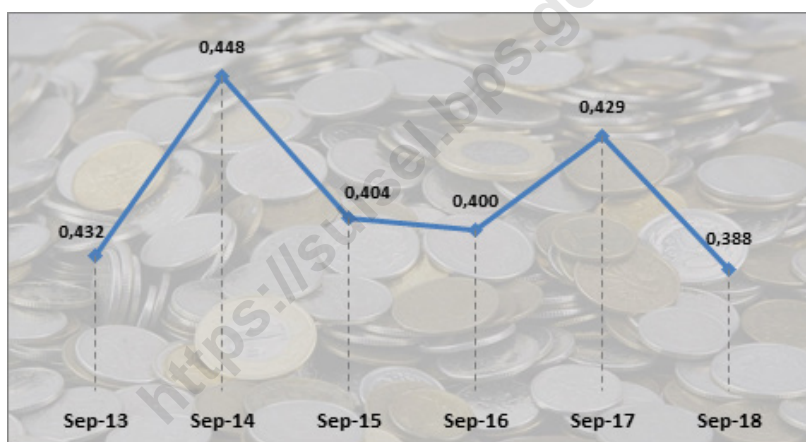
BAB IV

Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

<https://sulsel.bps.go.id>

4.1. Disparitas Antarindividu

Ketimpangan capaian pembangunan manusia yang terjadi antarindividu tidak dapat dihindari. Manusia adalah fokus utama dalam pembangunan manusia. Individu harus dapat dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan September 2013 – September 2018

Ketimpangan antarindividu tercermin dalam angka gini rasio. Gini rasio mengukur ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangan. Gini rasio di Sulawesi Selatan kondisi September 2018 sebesar 0,388, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2017 (0,429). Kondisi ini menunjukkan di tahun 2018 ketimpangan antar individu semakin mengecil.

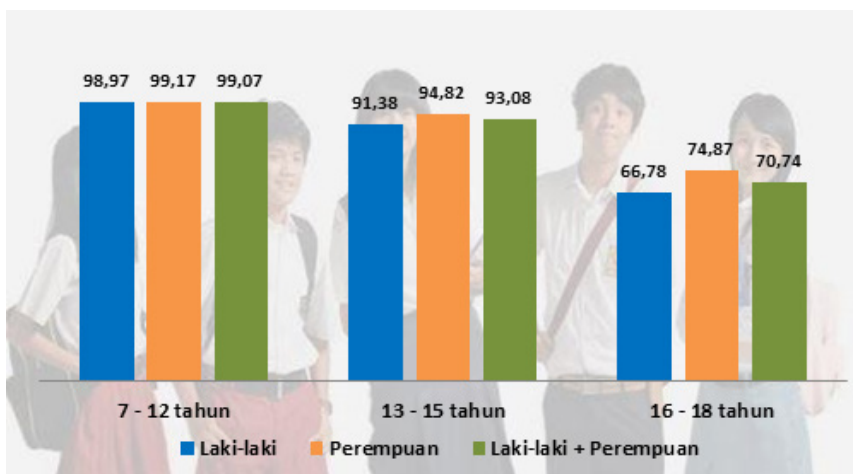
4.2. Disparitas Antargender

Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya

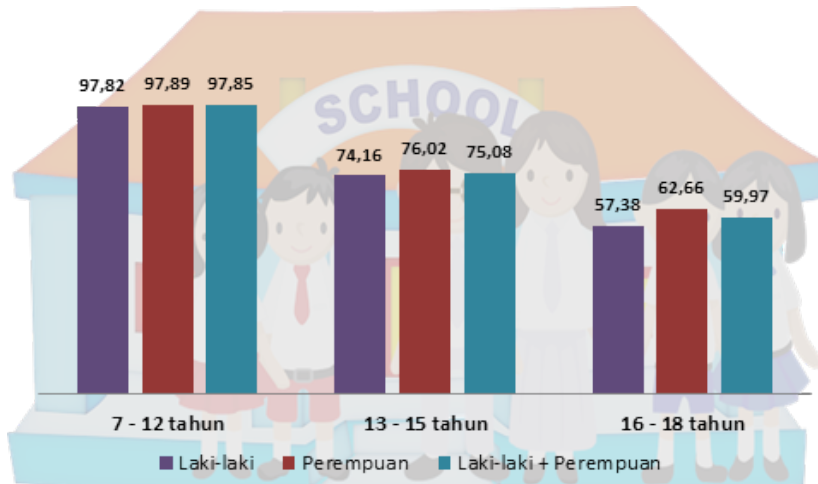
pembangunan yang ada serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar 93,15. Naik 0,31 poin dibanding tahun sebelumnya (2017 = 92,84). Peningkatan IPG merupakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Ketimpangan gender dari sisi pendidikan masih terjadi. Beberapa indikator pendidikan mencatat capaian perempuan masih belum setara dengan capaian laki-laki, misalnya rata-rata lama sekolah (RLS), kemampuan baca tulis. Pada tahun 2018, RLS perempuan berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,76 tahun. Sedangkan laki – laki telah menempuh pendidikan selama 8,32 tahun. Sementara kemampuan baca tulis atau melek huruf laki-laki, di tahun 2018 mencapai 93,56 persen, sementara perempuan 90,19 persen. Namun secara umum, capaian kesetaraan gender untuk pendidikan bisa dikatakan cukup baik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang (SD hingga SMA) menunjukkan capaian perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Data yang sama berlaku pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), kedua angka tersebut menunjukkan dominasi perempuan dibanding laki-laki. APK sendiri merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sementara APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Melihat komposisi jumlah penduduk perempuan yang memang lebih banyak dibanding laki-laki di usia sekolah, menunjukkan bahwa kesempatan menuntut ilmu tidak melihat masalah gender lagi, peluang pendidikan sudah terbuka lebar bagi siapapun.



Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018 (persen)

Sementara itu, gender dalam ketenagakerjaan masih terjadi kesenjangan. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jika TPAK laki-laki tahun 2018 mencapai 80,15 persen, TPAK perempuan hanya mencapai 47,19 persen.

4.3. Disparitas Antawilayah

Sulawesi Selatan memiliki potensi penduduk dan wilayah yang sangat kaya. Namun, potensi yang dimiliki ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Luas wilayah dan belum meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi. Baik antar perkotaan dan perdesaan, antar kabupaten dan antar kota dengan kabupaten.

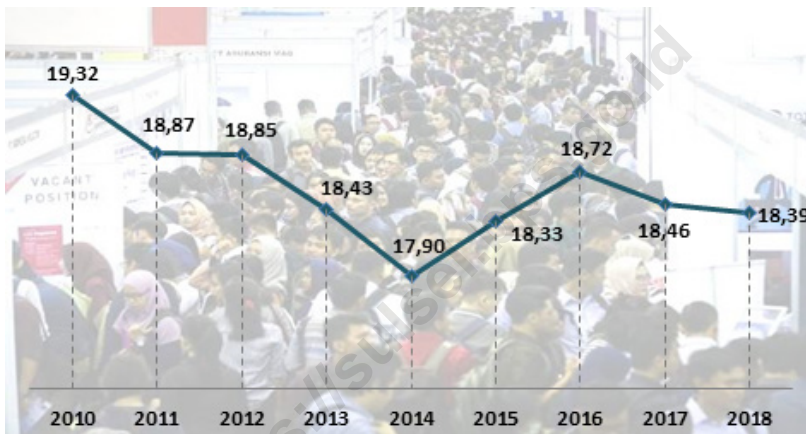
Disparitas antar Kabupaten/Kota

Disparitas antar kabupaten/kota terlihat dari kesenjangan capaian IPM tertinggi dan terendah di tahun 2018, yaitu Kota Makassar (IPM 2018 = 81,73) dengan Kabupaten Jeneponto (IPM = 63,33). Selisih capaian IPM kabupaten/kota pada tahun 2018 mencapai 18,40 poin. Jika diperhatikan trennya, selama tahun 2010 hingga 2018, perbedaan IPM kedua kabupaten/kota cenderung turun. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten/kota cenderung mengecil.

Jika dilihat menurut dimensi penyusun IPM, pada dimensi kesehatan, capaian AHH tertinggi pada tahun 2018 adalah Kabupaten Toraja Utara (73,09 tahun)

dan terendah adalah Kabupaten Jeneponto (65,89 tahun). Selisih antara kedua wilayah ini mencapai 7,20 poin pada tahun 2018. Jika diperhatikan tren selama periode 2010 hingga 2018, menunjukkan tren penurunan kesenjangan.

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kabupaten/kota. Pada komponen harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) capaian tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Makassar dan terendah Kabupaten Jeneponto. Selama periode tahun 2010 hingga 2018 tren menunjukkan kesenjangan yang menurun pada harapan lama sekolah. Sementara rata-rata lama sekolah memperlihatkan kesenjangan yang melebar.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

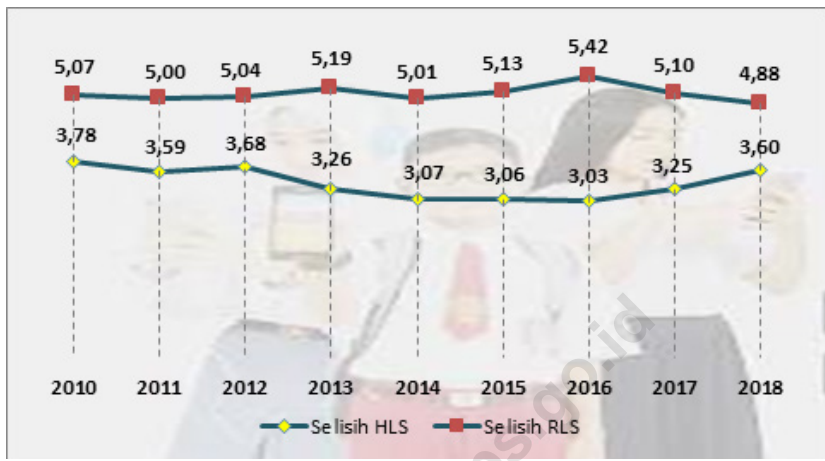
Gambar 4.4 Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2010-2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.5 Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2010 – 2018 (Tahun)

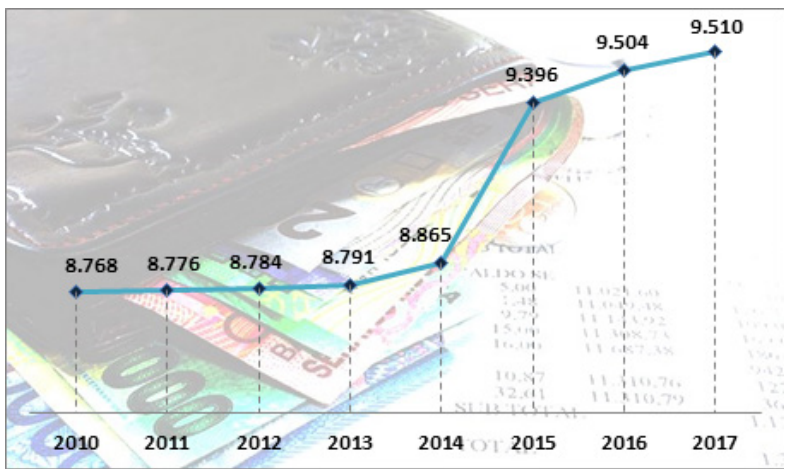
Pada dimensi ekonomi, yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga masih menunjukkan adanya disparitas antara kabupaten/kota. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2018, tertinggi adalah Kota Makassar dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.6 Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2010 – 2018 (Tahun)

Selama periode tahun 2010 hingga 2018 disparitas pada dimensi ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja semakin melebar. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena jurang ketimpangan akan semakin menganga. Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tana Toraja harus ditingkatkan.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 4.7 Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2010 – 2018 (Ribu Rupiah)

BAB V

Daya Beli Masyarakat

<https://sulsel.bps.go.id>



5.1. Isu Pelemahan Daya Beli

Daya beli masyarakat Sulawesi Selatan dapat diukur dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap fluktuasi kegiatan ekonomi antarwaktu. Konsumsi saat ini mempengaruhi konsumsi di masa depan dan sebaliknya, prediksi tentang masa depan mempengaruhi konsumsi saat ini. Selanjutnya dalam jangka panjang, pola konsumsi dan tabungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang rendah pun masih mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Selain itu, konsumsi merupakan satu-satunya andalan dalam pertumbuhan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara pada masa pasca krisis.

Tabel 5.1 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2013-2018

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
Konsumsi rumah tangga	56,65	55,58	54,52	54,19	54,22	54,32
Konsumsi LNPRT	1,19	1,30	1,25	1,23	1,23	1,33
Konsumsi Pemerintah	11,10	10,66	10,69	9,92	9,48	9,70
PMTB	36,60	36,98	37,01	37,5	37,82	37,19
Perubahan Inventori	1,71	-0,52	1,66	1,29	0,71	0,33
Ekspor Luar Negeri	7,24	7,29	5,92	4,73	4,38	5,04
Impor Luar Negeri	5,92	3,68	3,93	3,45	3,86	4,18
Net Ekspor Daerah	-7,31	-7,61	-7,13	-5,41	-3,97	-3,73
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

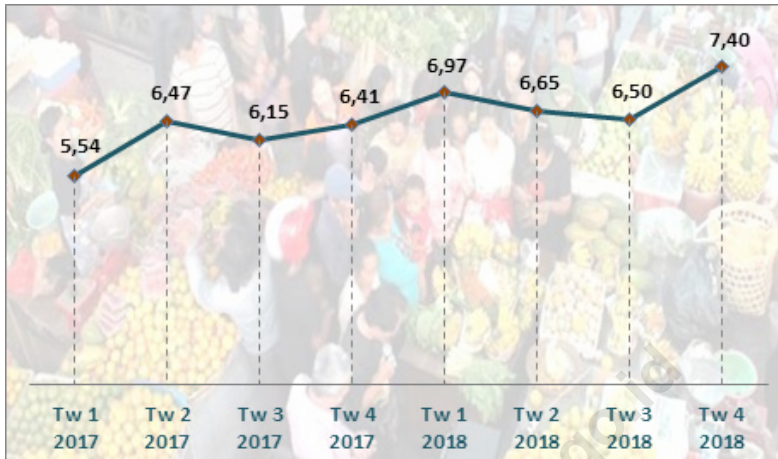
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa sejak tahun 2013 peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Sulawesi Selatan masih diatas 50 persen. Daya beli masyarakat yang meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dibanding komponen PDRB lainnya.

Jika dicermati lebih lanjut untuk kondisi triwulanan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2017-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada triwulan I 2018, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan

tumbuh mencapai 6,97 persen, kemudian melambat di triwulan berikutnya sebesar 6,65 persen, lalu kembali melambat di triwulan III sebesar 6,50 persen dan kembali tumbuh di triwulan IV sebesar 7,40 persen.



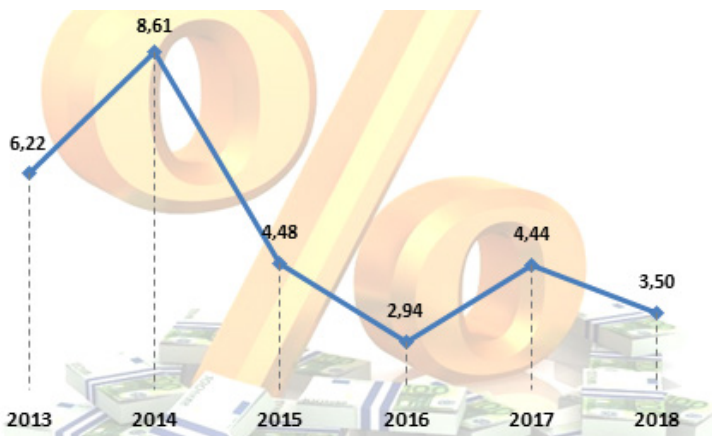
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Sulawesi Selatan (y on y), 2017-2018 (persen)

5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli

Keynes (1936) dalam Analisis Isu Terkini (BPS,2017) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Kondisi daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

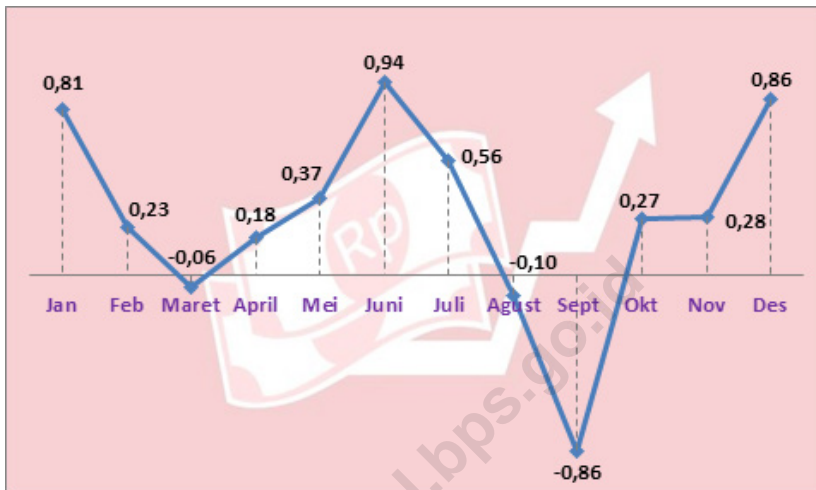
Daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak mampu akan menurun apabila harga – harga barang terus naik di setiap kategori komoditas di pasar. Oleh sebab itu, inflasi dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi riil masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2013-2018

Selatan tahun 2018 adalah sebesar 3,50 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2018 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 3,50 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2017 yang sebesar 4,44 persen, kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa tingkat kestabilan harga tahun 2018 jauh lebih baik dibanding dengan tahun 2017.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2018

Angka inflasi bulanan dari gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2018 menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang tahun 2018 Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan deflasi sebanyak 3 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018 sebesar 0,94 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan April 2018 sebesar 0,18 persen. Penyebab utama kenaikan inflasi pada bulan Juni adalah naiknya harga barang pada semua kelompok pengeluaran akibat pengaruh hari raya, diantaranya sandang, bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.

Di sisi lain, deflasi tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada bulan September sebesar 0,86 persen. Penyebab utamanya terjadinya deflasi adalah turunnya harga barang dan jasa yang tercakup dalam kelompok pengeluaran bahan makanan dan transportasi.

Berdasarkan hasil gambaran indikator pengukuran daya beli masyarakat (pengeluaran konsumsi rumah tangga) dan faktor yang diduga mempengaruhi daya beli masyarakat (laju inflasi) memberikan gambaran efek yang searah. Artinya, meskipun terjadi peningkatan inflasi pada bulan berjalan, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap meningkat karena masyarakat akan tetap membeli barang-barang yang sama.

Lampiran

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 1

Tren Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7300	SULAWESI SELATAN	69,12	69,31	69,50	69,60	69,80	69,82	69,84	70,08
7301	Selayar	67,43	67,47	67,49	67,50	67,70	67,76	67,82	68,03
7302	Bulukumba	66,23	66,31	66,39	66,43	66,73	66,84	66,96	67,27
7303	Bantaeng	69,52	69,59	69,65	69,68	69,77	69,84	69,90	70,11
7304	Jeneponto	65,18	65,27	65,35	65,39	65,49	65,57	65,65	65,89
7305	Takalar	65,80	65,84	65,88	65,90	66,20	66,29	66,38	66,64
7306	Gowa	69,75	69,77	69,78	69,78	69,88	69,92	69,95	70,11
7307	Sinjai	66,19	66,26	66,33	66,36	66,46	66,54	66,61	66,83
7308	Maros	68,44	68,47	68,49	68,50	68,55	68,58	68,60	68,74
7309	Pangkajene Kepulauan	65,25	65,30	65,35	65,37	65,67	65,77	65,86	66,12
7310	Barru	67,52	67,61	67,69	67,73	68,03	68,16	68,30	68,60
7311	Bone	65,57	65,67	65,76	65,81	66,01	66,12	66,22	66,50
7312	Soppeng	68,15	68,26	68,37	68,42	68,52	68,62	68,72	69,02
7313	Wajo	65,63	65,75	65,87	65,93	66,23	66,38	66,52	66,79
7314	Sidenreng Rappang	67,99	68,02	68,05	68,07	68,57	68,69	68,82	69,15
7315	Pinrang	67,89	67,95	68,00	68,03	68,43	68,55	68,68	68,98
7316	Enrekang	70,15	70,18	70,20	70,21	70,31	70,34	70,38	70,55
7317	Luwu	69,08	69,11	69,13	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84
7318	Tana Toraja	72,06	72,08	72,10	72,11	72,41	72,48	72,56	72,80
7322	Luwu Utara	66,91	66,95	66,98	67,00	67,40	67,50	67,61	67,90
7325	Luwu Timur	69,32	69,38	69,42	69,44	69,64	69,71	69,79	70,03
7326	Toraja Utara	72,46	72,47	72,49	72,50	72,80	72,87	72,94	73,09
7371	Kota Makassar	71,37	71,38	71,38	71,38	71,47	71,49	71,51	71,70
7372	Kota Parepare	70,36	70,37	70,38	70,39	70,59	70,64	70,69	70,88
7373	Kota Palopo	70,00	70,05	70,10	70,12	70,20	70,25	70,30	70,49

Lampiran 2

Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Expected Years of Schooling (EYS)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7300	SULAWESI SELATAN	11,82	12,16	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28	13,34
7301	Selayar	11,68	11,78	11,88	11,98	12,29	12,44	12,45	12,46
7302	Bulukumba	11,21	11,56	11,91	12,31	12,32	12,64	12,65	12,79
7303	Bantaeng	10,35	10,70	11,07	11,48	11,67	11,88	11,99	12,01
7304	Jeneponto	10,24	10,54	11,22	11,68	11,70	11,77	11,93	11,95
7305	Takalar	9,64	10,17	10,81	11,31	11,61	12,00	12,21	12,22
7306	Gowa	11,65	11,76	12,19	12,45	12,74	13,03	13,04	13,29
7307	Sinjai	11,51	11,74	11,79	11,96	12,34	12,83	12,84	12,85
7308	Maros	11,18	11,57	11,96	12,37	12,67	12,96	12,97	12,99
7309	Pangkajene Kepulauan	10,98	11,40	11,83	12,37	12,38	12,39	12,40	12,41
7310	Barru	12,06	12,14	12,83	13,45	13,53	13,54	13,55	13,56
7311	Bone	11,20	11,43	11,85	12,16	12,41	12,42	12,43	12,67
7312	Soppeng	11,36	11,39	11,42	11,45	11,81	12,20	12,33	12,57
7313	Wajo	11,17	11,81	12,51	13,05	13,07	13,08	13,09	13,11
7314	Sidenreng Rappang	11,42	11,65	12,16	12,80	12,88	12,89	12,90	12,91
7315	Pinrang	11,87	12,27	12,52	13,16	13,17	13,18	13,19	13,20
7316	Enrekang	12,00	12,25	12,50	13,29	13,30	13,65	13,66	13,68
7317	Luwu	11,15	11,67	12,33	12,87	12,88	13,27	13,28	13,30
7318	Tana Toraja	11,47	12,02	12,49	12,89	13,23	13,24	13,25	13,50
7322	Luwu Utara	11,60	11,84	11,91	12,09	12,11	12,33	12,38	12,39
7325	Luwu Timur	11,54	11,75	11,79	11,95	12,36	12,78	12,79	12,81
7326	Toraja Utara	12,19	12,21	12,42	12,61	12,95	13,33	13,34	13,35
7371	Kota Makasar	13,83	14,22	14,48	14,75	14,76	14,80	15,18	15,55
7372	Kota Parepare	13,51	13,58	13,65	14,04	14,44	14,45	14,46	14,47
7373	Kota Palopo	13,84	14,16	14,49	15,01	15,02	15,03	15,05	15,06

Lampiran 3

Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Mean Years of Schooling (MYS)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7300	SULAWESI SELATAN	7,33	7,37	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95	8,02
7301	Selayar	6,74	6,82	6,90	7,10	7,16	7,17	7,18	7,40
7302	Bulukumba	6,59	6,61	6,63	6,66	6,68	6,86	7,16	7,34
7303	Bantaeng	5,47	5,70	5,92	6,16	6,16	6,17	6,45	6,47
7304	Jeneponto	5,24	5,38	5,43	5,63	5,64	5,65	5,98	6,21
7305	Takalar	6,27	6,30	6,34	6,57	6,57	6,64	6,77	6,91
7306	Gowa	6,50	6,52	6,74	6,99	7,24	7,52	7,74	7,75
7307	Sinjai	6,44	6,57	6,97	7,03	7,05	7,06	7,28	7,29
7308	Maros	7,10	7,12	7,14	7,17	7,19	7,20	7,42	7,43
7309	Pangkajene Kepulauan	6,74	6,78	7,10	7,31	7,32	7,33	7,48	7,49
7310	Barru	7,08	7,11	7,13	7,28	7,60	7,61	7,85	7,86
7311	Bone	5,75	5,87	5,91	6,11	6,55	6,76	6,77	6,97
7312	Soppeng	6,81	6,81	6,93	7,04	7,05	7,06	7,42	7,63
7313	Wajo	6,33	6,33	6,33	6,36	6,37	6,38	6,78	6,79
7314	Sidenreng Rappang	6,78	6,80	7,08	7,30	7,32	7,33	7,52	7,79
7315	Pinrang	7,24	7,33	7,43	7,45	7,47	7,48	7,54	7,84
7316	Enrekang	7,42	7,69	7,92	7,98	8,05	8,06	8,43	8,68
7317	Luwu	7,18	7,21	7,36	7,60	7,74	7,75	7,89	7,97
7318	Tana Toraja	7,69	7,75	7,80	7,81	7,91	7,92	7,93	7,94
7322	Luwu Utara	6,78	6,81	7,02	7,19	7,38	7,39	7,52	7,53
7325	Luwu Timur	7,61	7,70	7,78	7,80	7,87	7,88	8,20	8,45
7326	Toraja Utara	7,05	7,22	7,56	7,70	7,71	7,72	7,73	7,76
7371	Kota Makassar	10,24	10,42	10,61	10,64	10,77	11,07	11,08	11,09
7372	Kota Pare Pare	9,46	9,68	9,89	9,95	10,01	10,02	10,09	10,29
7373	Kota Palopo	9,83	9,89	9,95	9,96	10,25	10,26	10,33	10,51

Lampiran 4

Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018 (Ribu Rupiah)

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7300	SULAWESI SELATAN	9.459	9.560	9.632	9.723	9.992	10.281	10.489	10.814
7301	Selayar	7.423	7.506	7.564	7.656	7.793	8.123	8.436	8.666
7302	Bulukumba	9.127	9.136	9.145	9.618	9.777	10.040	10.217	10.331
7303	Bantaeng	9.984	10.117	10.226	10.294	10.467	10.596	10.751	11.153
7304	Jeneponto	8.237	8.305	8.348	8.417	8.489	8.559	8.747	8.957
7305	Takalar	9.026	9.165	9.280	9.351	9.423	9.759	9.845	10.134
7306	Gowa	8.361	8.420	8.455	8.515	8.578	8.717	9.009	9.179
7307	Sinjai	7.957	8.092	8.203	8.272	8.433	8.706	8.816	9.098
7308	Maros	9.069	9.155	9.258	9.355	9.468	9.758	10.121	10.558
7309	Pangkajene Kepulauan	9.892	10.058	10.090	10.161	10.517	10.670	10.837	11.197
7310	Barru	9.325	9.501	9.655	9.733	9.811	10.155	10.285	10.622
7311	Bone	7.635	7.722	7.785	7.845	7.930	8.275	8.470	8.686
7312	Soppeng	8.351	8.489	8.603	8.699	8.835	8.965	9.035	9.291
7313	Wajo	10.506	10.618	10.705	10.778	11.047	11.681	11.770	12.057
7314	Sidenreng Rappang	10.380	10.398	10.416	10.434	11.004	11.368	11.523	11.834
7315	Pinrang	10.398	10.514	10.605	10.680	10.791	10.899	11.279	11.508
7316	Enrekang	9.084	9.179	9.250	9.347	9.818	10.188	10.359	10.683
7317	Luwu	8.560	8.636	8.687	8.764	9.160	9.301	9.381	9.705
7318	Tana Toraja	6.066	6.124	6.156	6.214	6.273	6.509	6.801	7.087
7322	Luwu Utara	10.375	10.471	10.541	10.605	10.697	10.786	11.101	11.429
7325	Luwu Timur	11.813	11.828	11.844	11.859	11.926	11.960	12.030	12.346
7326	Toraja Utara	6.703	6.803	6.879	6.955	7.033	7.228	7.457	7.783
7371	Kota Makassar	14.842	14.907	14.947	15.079	15.669	16.013	16.367	16.597
7372	Kota Parepare	12.259	12.419	12.554	12.692	12.817	12.966	13.078	13.303
7373	Kota Palopo	11.372	11.493	11.590	11.713	12.005	12.156	12.319	12.662

Lampiran 5

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011-2018

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7300	SULAWESI SELATAN	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90
7301	Selayar	62,53	62,87	63,16	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04
7302	Bulukumba	63,36	63,82	64,27	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70
7303	Bantaeng	63,07	63,99	64,88	65,77	66,20	66,59	67,27	67,76
7304	Jeneponto	58,95	59,62	60,55	61,45	61,61	61,81	62,67	63,33
7305	Takalar	60,83	61,66	62,58	63,53	64,07	64,96	65,48	66,07
7306	Gowa	64,42	64,65	65,45	66,12	66,87	67,70	68,33	68,87
7307	Sinjai	62,13	62,74	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24
7308	Maros	64,95	65,50	66,06	66,65	67,13	67,76	68,42	68,94
7309	Pangkajene Kepulauan	63,60	64,30	65,24	66,16	66,65	66,86	67,25	67,71
7310	Barru	65,73	66,07	67,02	67,94	68,64	69,07	69,56	70,05
7311	Bone	60,21	60,77	61,40	62,09	63,11	63,86	64,16	65,04
7312	Soppeng	63,80	64,05	64,43	64,74	65,33	65,95	66,67	67,60
7313	Wajo	64,00	64,88	65,79	66,49	66,90	67,52	68,18	68,57
7314	Sidenreng Rappang	65,88	66,19	67,15	68,14	69,00	69,39	69,84	70,60
7315	Pinrang	66,96	67,64	68,14	68,92	69,24	69,42	69,90	70,62
7316	Enrekang	67,03	67,74	68,39	69,37	70,03	70,79	71,44	72,15
7317	Luwu	64,71	65,43	66,39	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60
7318	Tana Toraja	63,22	63,96	64,55	65,08	65,75	66,25	66,82	67,66
7322	Luwu Utara	65,57	65,99	66,40	66,90	67,44	67,81	68,35	68,79
7325	Luwu Timur	68,94	69,34	69,53	69,75	70,43	70,95	71,46	72,16
7326	Toraja Utara	64,48	64,89	65,65	66,15	66,76	67,49	67,90	68,49
7371	Kota Makassar	77,82	78,47	78,98	79,35	79,94	80,53	81,13	81,73
7372	Kota Parepare	74,20	74,67	75,10	75,66	76,31	76,48	76,68	77,19
7373	Kota Palopo	74,02	74,54	75,02	75,65	76,27	76,45	76,71	77,30

Lampiran 6

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2011-2018

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19
SUMATERA UTARA	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
SUMATERA BARAT	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73
RIAU	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44
JAMBI	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65
SUMATERA SELATAN	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39
BENGGULU	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64
LAMPUNG	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02
KEP. BANGKA BELITUNG	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67
KEP. RIAU	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84
DKI JAKARTA	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47
JAWA BARAT	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30
JAWA TENGAH	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12
DI YOGYAKARTA	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53
JAWA TIMUR	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77
BANTEN	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95
BALI	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77
NUSA TENGGARA BARAT	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30
NUSA TENGGARA TIMUR	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39
KALIMANTAN BARAT	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98
KALIMANTAN TENGAH	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42
KALIMANTAN SELATAN	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38	69,05	69,65	70,17
KALIMANTAN TIMUR	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	75,83
KALIMANTAN UTARA	-	-	67,99	68,64	68,76	69,20	69,84	70,56
SULAWESI UTARA	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39	71,05	71,66	72,20
SULAWESI TENGAH	64,27	65,00	65,79	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88
SULAWESI SELATAN	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90
SULAWESI TENGGARA	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75	69,31	69,86	70,61
GORONTALO	63,48	64,16	64,70	65,17	65,86	66,29	67,01	67,71
SULAWESI BARAT	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10
MALUKU	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05	67,60	68,19	68,87
MALUKU UTARA	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76
PAPUA BARAT	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74
PAPUA	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06
INDONESIA	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Lampiran 7

Tren Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2017-2018

Provinsi	AHH		HLS		RLS		PPP	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ACEH	69,52	69,64	14,13	14,27	8,98	9,09	8.957	9.186
SUMATERA UTARA	68,37	68,61	13,10	13,14	9,25	9,34	10.036	10.391
SUMATERA BARAT	68,78	69,01	13,94	13,95	8,72	8,76	10.306	10.638
RIAU	70,99	71,19	13,03	13,11	8,76	8,92	10.677	10.968
JAMBI	70,76	70,89	12,87	12,90	8,15	8,23	9.880	10.357
SUMATERA SELATAN	69,18	69,41	12,35	12,36	7,99	8,00	10.220	10.652
BENGKULU	68,59	68,84	13,57	13,58	8,47	8,61	9.778	10.162
LAMPUNG	69,95	70,18	12,46	12,61	7,79	7,82	9.413	9.858
KEP. BANGKA BELITUNG	69,95	70,18	11,83	11,87	7,78	7,84	12.066	12.666
KEP. RIAU	69,48	69,64	12,81	12,82	9,79	9,81	13.566	13.976
DKI JAKARTA	72,55	72,67	12,86	12,95	11,02	11,05	17.707	18.128
JAWA BARAT	72,47	72,66	12,42	12,45	8,14	8,15	10.285	10.790
JAWA TENGAH	74,08	74,18	12,57	12,63	7,27	7,35	10.377	10.777
DI YOGYAKARTA	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13.521	13.946
JAWA TIMUR	70,80	70,97	13,09	13,10	7,34	7,39	10.973	11.380
BANTEN	69,49	69,64	12,78	12,85	8,53	8,62	11.659	11.994
BALI	71,46	71,68	13,21	13,23	8,55	8,65	13.573	13.886
NUSA TENGGARA BARAT	65,55	65,87	13,46	13,47	6,90	7,03	9.877	10.284
NUSA TENGGARA TIMUR	66,07	66,38	13,07	13,10	7,15	7,30	7.350	7.566
KALIMANTAN BARAT	69,92	70,18	12,50	12,55	7,05	7,12	8.472	8.860
KALIMANTAN TENGAH	69,59	69,64	12,45	12,55	8,29	8,37	10.492	10.931
KALIMANTAN SELATAN	68,02	68,23	12,46	12,50	7,99	8,00	11.600	12.062
KALIMANTAN TIMUR	73,70	73,96	13,49	13,67	9,36	9,48	11.612	11.917
KALIMANTAN UTARA	72,47	72,50	12,79	12,82	8,62	8,87	8.643	8.943
SULAWESI UTARA	71,04	71,26	12,66	12,68	9,14	9,24	10.422	10.731
SULAWESI TENGAH	67,32	67,78	13,04	13,13	8,29	8,52	9.311	9.488
SULAWESI SELATAN	69,84	70,08	13,28	13,34	7,95	8,02	10.489	10.814
SULAWESI TENGGARA	70,47	70,72	13,36	13,53	8,46	8,69	9.094	9.262
GORONTALO	67,14	67,45	13,01	13,03	7,28	7,46	9.532	9.839
SULAWESI BARAT	64,34	64,58	12,48	12,59	7,31	7,50	8.736	9.051
MALUKU	65,40	65,59	13,91	13,92	9,38	9,58	8.433	8.721
MALUKU UTARA	67,54	67,80	13,56	13,62	8,61	8,72	7.792	7.980
PAPUA BARAT	65,32	65,55	12,47	12,53	7,15	7,27	7.493	7.816
PAPUA	65,14	65,36	10,54	10,83	6,27	6,52	6.996	7.159
INDONESIA	71,06	71,20	12,85	12,91	8,10	8,17	10.664	11.059

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-7581-01-7

